



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KECAMATAN LIMA
PULUH KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

DIRA ATRIKA
NIM. 11641202654

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya
terhadap penulisan skripsi saudara:

: Dira Atrika

: 11641202654

: Peran Pendamping Dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program
Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk
dijunqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai
sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk
ikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-so@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "PERAN PENDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN" yang ditulis oleh :

: Dira Atrika
: 11641202654
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

hari / tanggal : Senin / 10 Agustus 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620200641015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua Penguji I

Dr. Asliti, M.Ag
NIP. 197008172007012031

Penguji III

Yefni, M.Si
NIP. 197009142014112001

Sekretaris / Penguji II

Mublasin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 196805132005011009

Penguji IV

H. Darusman, M.Ag
NIP. 197008131997031001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Proposal : DIRA ATRIKA dengan NIM : 11641202654 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul "PERAN PENDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU."

Telah diseminarkan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Maret 2020

Dengan ini dapat diterima penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2020

Panitia Seminar Proposal

Penguji II

Penguji I

Dr. Ginda Harahap, M.Ag

NIP: 199303261991021001

Dr. Aslati, M.Ag

NIP: 197008172007012031

Pekanbaru, Rabu 29 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dosen Pembimbing Skripsi

: Nota Dinas

: Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di _

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara Dira Atrika NIM : 11641202654 dengan judul "PERAN PENDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU". Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Dr. Aslati, M.Ag

NIK. 19700817 200701 2 031

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Dira Atrika

: 11641202654

: Batu Ampar, 09 Agustus 1998

: Pengembangan Masyarakat Islam

: Peran Pendamping Dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 September 2020

Yang membuat pernyataan



Dira Atrika
NIM. 11641202654

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Dira Atrika
Nim : 11641202654
Judul : Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya KPM dari PKH yang butuh pendamping agar program tersebut dapat memberi manfaat kepada KPM, dengan adanya Peran Pendamping dalam Pembinaan maka PKH harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasan yang dapat merubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan? Konsep teori yang peneliti gunakan peran pendamping menurut ASTD (1998) mengemukakan empat fungsi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: Narasumber, Pelatih, Mediator, dan Penggerak. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, kemudian informan penelitian berjumlah 8 (delapan) orang dengan kategori yakni 1 (satu) orang sebagai informan kunci dan 7 (tujuh) orang informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pembinaan yang dilakukan Pendamping PKH sudah berjalan sesuai perannya seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok peserta KPM, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi dan diskusi dengan KPM, memberikan konsultasi dan mencari serta mengatur sumber dana, sehingga pendamping menjadi “agen perubahan” untuk KPM. Namun ada peran pendamping yang belum maksimal, yaitu peran sebagai narasumber yang harus menjadi pematari disetiap modul yang ada pada kegiatan pelatihan yang diberikan kepada KPM PKH.

Kata Kunci: Peran Pendamping.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Dira Atrika
Student Reg. No : 11641202654
Title : The Role of Facilitator in Developing the PKH (Ideal Family Program) Family Recipients in Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru

This research is motivated by the existence of the KPM of the PKH which needs a facilitator to support the program. With the facilitator support, the PKH can improve the insight and knowledge of community. The research problem is how is the role of facilitator in developing the recipients of the PKH program? The concept used is the role of facilitator proposed by ASTD (1998). There are four functions of facilitator in community service, namely Informant, Trainer, Mediator, and Motivator. This research is a qualitative-descriptive study. There are 8 informants selected, 1 (one) person as a key informant and 7 (seven) supporting informants. Data is collected from interview, observation and documentation. This thesis finds that the facilitator has implemented his or her role such as making social analysis, managing group of the KPM participants, establishing relation, negotiating, communicating, discussing with the KPM, providing a consultation and managing the fund resources. The facilitator then plays his role as the agent of changes for the KPM. However, his or her role as informant is not maximally performed like being speaker in a training given for the KPM.

Key words: Role, Facilitator.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad serta nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.**

Shalawat serta salam senantiasa penulis hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyebarkan dakwah agama Islam kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pembimbing dan pihak-pihak lain, baik bantuan berupa moril maupun materil. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Amri Ujang dan Ibunda, terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih atas semua bantuan dan dukungan baik moril maupun materil selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I selaku sekertaris jurusan yang memberikan masukan-masukan, arahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna bagi penulis.
8. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang juga telah memberikan masukan-masukan dan perbaikan kepada penulis.
9. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik.
11. Ibu Endang Astuti, selaku Fasilitator Pendamping PKH yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Seluruh KPM PKH Kecamatan Lima Puluh yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis.
13. Rekan-rekan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Lokal A, B, dan C angkatan 2016 serta adik-adik dan kakak-kakak tingkat di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang tak bisa di sebutkan satu persatu.
14. Terimakasih untuk seluruh pihak yang turut membantu penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

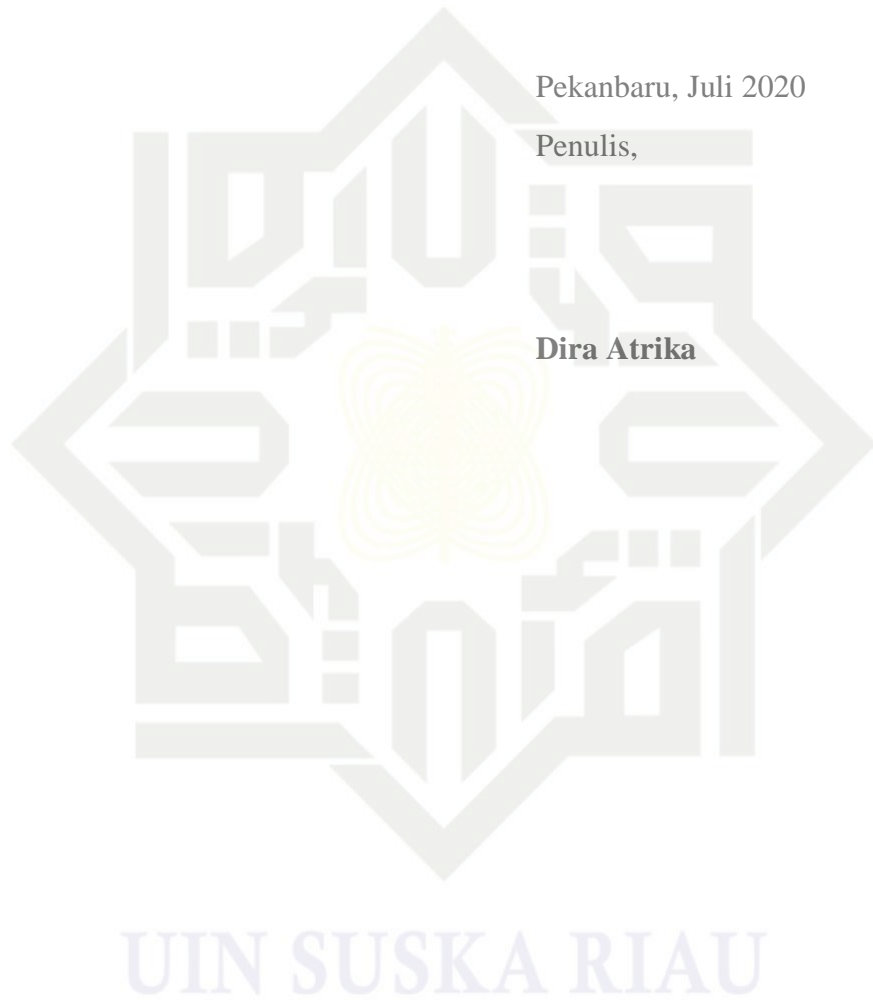
Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kelemahan didalam skripsi ini yang datang dari penulis sendiri. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis,

Dira Atrika



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR DOKUMENTASI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	6
B. Kajian Terdahulu.....	31
C. Konsep Operasional	32
D. Kerangka Pikir	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Validasi Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lima Puluh	39
B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh	39

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	59

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk dan KK Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Lima Puluh Tahun 2019	41
Tabel 4.2	Mata Pencarian	41
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Limapuluh	42
Tabel 4.4	Sarana Ibadah di wilayah Kecamatan Limapuluh	42
Tabel 4.5	Sarana Kesehatan di wilayah Kecamatan Limapuluh.....	42
Tabel 4.6	Data KPM Kecamatan Lima Puluh	43
Tabel 4.7	Kegiatan Pendamping	44
Tabel 4.8	Jumlah Kelompok KPM PKH	45
Tabel 4.9	KPM Non Eligible (NE) atau Graduasi Mandiri Tahun 2019	46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo PKH	25
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1	Peta Kecamatan: Lima Puluh.....	39
Gambar 4.3	Data Besaran Uang Bantuan PKH 2020	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kisi-Kisi Instrument Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Pedoman Observasi

Lampiran 4 : Pedoman Dokumentasi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR DOKUMENTASI

- Gambar I : Wawancara dengan Fasilitator Pendamping PKH Kecamatan Lima Puluh
- Gambar 2 : Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM PKH
- Gambar 3 : Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM PKH
- Gambar 4 : Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM PKH
- Gambar 5 : Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga KPM PKH





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia, kemiskinanpun tidak dapat di hindari. Masalah kemiskinan bukan hal asing di negara ini. Pada umumnya masyarakat menjadi sangat miskin bukan karena pangan yang masih kurang tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan, kesehatan dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.¹

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bersyarat bagi masyarakat miskin yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDGs) yang merupakan salah satu kebijakan internasional yang membahas penanggulangan kemiskinan, dengan memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (KSM) yang di dalamnya terdapat ibu hamil, balita, anak usia SD dan anak usia SMP.²

Perolehan bantuan yang besarnya ditentukan oleh banyaknya kategori dalam Keluarga Sangat Miskin yang bersangkutan ini disertai kewajiban peserta PKH untuk menjalankan dua komitmen penting di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Komitmen bidang kesehatan berlaku bagi ibu hamil dan balita yang harus memeriksakan kesehatannya secara rutin tiap bulan di fasilitas kesehatan terdekat (puskesmas, pustu, poskesdes,

¹ Atu Nuri Amin. *Efeektifitas Prorgam Penangulungan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Di Kota Surabaya*. (Jawa Timur : 2010) Hal.9

² Direktorat Jendral Perlindungan & Jaminan Sosial RI. *Pedoman Operasional Kelembagaan PKH*. Daerah (Jakarta: Kementrian Sosial Ri, 2014) Hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posyandu dan lain-lain). Sedangkan untuk peserta didik diwajibkan untuk memenuhi absensi minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulannya.

Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat. PKH merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu KPM pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta merubah perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan rumah tangga tersebut untuk jangka lebih panjang.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan, pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksanaan pendampingan di tingkat Kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin dan peran pendamping. Pendamping sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan pekerjaan, dan fasilitas pelayanan publik³.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dimulai tepatnya pada tahun 2015. Peserta Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lima Puluh terbagi dari hasil validasi data dan closing oleh pendamping. Adapun jumlah kelompok peserta di Kecamatan Lima Puluh berkisar 20 kelompok dimana pada setiap kelompoknya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara kelompok. Pendamping akan melaksanakan pertemuan kelompok bersama anggota

³ Departemen Sosial Republik Indonesia, Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap bulannya dan setiap pertemuan akan ada materi dan agenda-agenda lain dalam pertemuan kelompok.

Berdasarkan survey awal penelitian yang dilakukan pada saat pertemuan kelompok banyak hal-hal yang dibahas mulai dari menyampaikan/ menginformasikan hal-hal yang dianggap penting kepada anggota PKH dan pendamping juga mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh peserta PKH. Selain itu Pendamping juga akan senantiasa berkoordinasi dengan aparat kelurahan maupun kecamatan dalam rangka terbangunnya kerjasama yang baik untuk mensukseskan Program Keluarga Harapan yang akan berjalan di masing-masing kelurahan maupun kecamatan tempat kegiatan diselenggarakan tepatnya di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Pendamping Program Keluarga Harapan bukan hanya mendata, kemudian memfasilitasi proses penyaluran. Namun harus mampu mentransformasikan semangat keluarga miskin bermental kaya, yang mana pendamping bisa membantu keluarga penerima manfaat agar perekonomiannya terangkat dari tingkat prasejahtera, mengarahkan KPM untuk mengelola keuangan keluarga secara tepat. Pendamping diharapkan dapat melakukan hal-hal kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembinaan dalam program keluarga harapan, sehingga tujuan kemandirian dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat tercapai dengan adanya perubahan yang dirasakan masyarakat itu sendiri.

Oleh karna itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PENDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU”**.

B. Penegasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan mengenai beberapa istilah utama yang digunakan sebagai judul penelitian. Adapun batasan istilah yang dimaksud adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peran Pendamping

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program karna tugasnya sebagai narasumber, pelatih, penggerak, dan mediator untuk masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau yang disingkat dengan PKH adalah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat atau yang disingkat dengan KPM dan sudah memenuhi syarat kepesertaan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH lebih dikmaksutkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin⁴

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru”

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : ”Untuk Mengetahui Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru”.

E. Kegunaan Penelitian

1. Akademis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas

⁴ Kementerian Sosial, Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan. Tahun 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian akademik.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan referensi bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya dalam melihat peran pendamping program keluarga harapan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam 6 (enam) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka pikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji validasi dan teknik analisa data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

1. Peran Pendamping

a. Pengertian Peran Pendamping

Peran (role) merupakan suatu konsep perihal apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peran mempunyai padanan kata yaitu “ Peranan”. Peranan adalah sekumpulan kegiatan altruistik yang dilakukan guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama antara penyedia dan penerima pelayanan. Peranan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam situasi tertentu. Peranan juga tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan peranan lainnya⁵.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), jadi apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran. Keduanya saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut Abu Ahmadi (1982) mendefenisikan peran yaitu :

⁵ Edi Suharto, dkk, pekerja sosial di Indonesia sejarah dan Dinamika Perkembangan (Yogyakarta: samudra Biru, 2011) hlm. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“peran (role) adalah suatu kompleks penghargaan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Peran dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang atau organisasi. Menurut Levison dalam bukunya syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:menerangkan bahwa suatu peranan mencakup 3 hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam ini merupakan rangkian-rangkaian dalam peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupab kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang adapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁶.

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga sering disebut sebagai fasilitator masyarakat (*Comunity Facilitator/CF*) karna tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.

Istilah “Fasilitator” itu sendiri, adalah pekerjaatau pelaksa pemberdayaan masyrakat. Sedang Lippit (1958) dan Rogers (1983) menyebutnya sebagai “agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam

⁶ Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadopsi inovasi. Karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangku kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat⁷.

b. Prinsip-prinsip Fasilitasi

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dipahami sebagai upaya membangun ikatan atau hubungan yang menekankan pada tiga aspek:

- a) Partisipasi diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber, tenaga manajemen lokal
- b) Penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, terlihat dari adanya pembentukan organisasi lokal termasuk didalamnya lembaga ada yang bertanggung jawab atas masalah sosial kemasyarakatan
- c) Keyakinan umum mengenai situasi dan arahan perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya.

Aspek khusus dalam perubahan sosial yang menjadi pemikiran pokok sebagai program pembangunan masyarakat, yaitu adanya ketimpangan baik di dalam maupun di antara komunitas tersebut.

Melalui strategi “Pengembangan Masyarakat” diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya, politik dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan serta hubiungan dengan komunitas lainnya. Pendamping sosial tidak saja berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar. Pengembangan sumberdaya manusia, atau penguatan kelembagaan tetapi juga berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat untuk

⁷ Totok Mardikanto. Poerwoko Soebiato, *Pengembangan Masyarakat Dalam Prespekif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012) Hal. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melepaskan diri dari perbedaan rasial, ketidak seimbangan kelas dan gender, serta menghapuskan penindasan mayoritas.

2) Berbasis Nilai dan Moral

Pendampingan tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang bersifat material seperti penyediaan lapangan kerja, pemenuhan pangan, pendapatan, infrastruktur dan fasilitasi sosial lainnya. Pendampingan harus dipandang sebagai upaya meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan dan “sikap” atau nilai yang dijunjung tinggi. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan “manusiawi” dan beradab untuk mencapai tujuan pembangunan. Artinya, dapat saja sekelompok orang telah terbangun dalam arti berada pada standar hidup layak, tetapi dengan cara-cara yang “tak pantas” dilihat dari perspektif peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi jelas bahwa pemberdayaan merupakan cara-cara yang beradab dalam membangun masyarakat.

3) Penguatan Jejaring Sosial

Dalam konteks pendamping sosial, aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui interaksi dan komunikasi saling menguntungkan dalam bentuk jejaringan. Peningkatan kapasitas suatu kelompok sulit berhasil jika tidak melibatkan komunitas lain yang memiliki kepentingan dan hubungan yang sama. Pengembangan jejaringan perlu dilandasi pada pemahaman terhadap sistem relasi antar pelaku berbasis komunitas dan lokalitas dengan asumsi bahwa pelaku memiliki pemahaman yang sama tentang pengembangan jejaringan. Dengan kata lain, perlu dibangun pemahaman bersama antar pelaku seperti LSM, perguruan tinggi, ormas, bank, lembaga sosial, pemerintah dan lembaga internasional untuk membangun jejaring sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses jejaringan membutuhkan implementasi prinsip-prinsip kesetaraan, bersifat informal, partisipatif, komitmen yang kuat, sinergisitas dan upaya membangun kekuatan untuk membantu masyarakat memecahkan permasalahan dan menemukan solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan usaha produktif berbasis komunitas dan lokalitas diharapkan dapat melibatkan pelaku dan lembaga lain, seperti organisasi pemerintah. Keberhasilan jejaringan sebagai media untuk perumusan kebijakan menjadi sangat penting tetapi ini semua tergantung kepada komitmen semua pelaku dalam jejaring tersebut.

Peranan pemerintah lokal lebih bersifat sebagai fasilitator bukan hanya sebagai donatur. Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah atau pengusaha kecil di kawasan ini. Dalam hal ini penguatan kelembagan merupakan hal penting dalam pemberdayaan masyarakat.

4) Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan umum saja tetapi lebih ditekankan pada upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk memutuskan dan bertindak didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan dan tantangan ke depan. Fasilitator tidak sekedar dituntut untuk menguasai teknik tertentu untuk memfasilitasi tetapi juga harus mampu membangun kemampuan pelaku lainnya mengenai program secara keseluruhan⁸.

⁸ Muhammad Soim,. Achmad Ghozali Syafe'I, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hal. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peran dan Fungsi Fasilitator

ASTD (1998) dalam M. Soim dan Achmad Ghazali Syafe'I (2018)⁹ mengemukakan empat fungsi utama pendamping atau fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) Narasumber (*resource person*)

Berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesimilasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator harus dapat memberikan motivasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, dalam kegiatan tersebut fasilitator masyarakat dapat memberikan fasilitas pelaksanaan diskusi antara anggota masyarakat. Hal ini fasilitator mempunyai tugas untuk menggerakkan diskusi supaya aspirasi setiap anggota dapat terpenuhi.

2) Pelatih (*trainer*)

Melakukan tugas pembimbing, konsultasi dan penyampaian materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik pengetahuan keterampilan dan sikap menjadi penting untuk menentukan proses (metodologi) dan hasil dari suatu pembelajaran.

Adapun tahapan yang harus dilakukan fasilitator sesuai dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”.

⁹ Ibid, Hal 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tahap selanjutnya adalah tahap pengkapasitasan atau capacity building atau enabling yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
- c) Tahapan yang terakhir adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.¹⁰

3) Mediator (*mediasi*)

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini dilakukan ketika terjadi ketegangan dan konflik antara kelompok yang berlawanan. Peran mediasi akan dilakukan oleh fasilitator untuk menjembatani perbedaan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya perdamaian. Cara-cara yang dilakukan oleh pemberdayaan dalam bekerjasama dengan masyarakat:

- a) Pengumpulan data dan informasi tentang masalah-masalah atau kebutuhan masyarakat dan sumber pemecahan masalah/kebutuhan.
- b) Penetapan tujuan dan rencana intervensi atau alternatif pemecahan masalah.
- c) Pelaksanaan intervensi adalah memelihara dan menciptakan kepercayaan diri masyarakat mendorong partisipasi masyarakat agar mau terlibat dalam proses pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan.

4) Penggerak

Berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivasi kerja kepada kelompok untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam peran ini pengembangan masyarakat

¹⁰Totok Mardikanto. Poerwoko Soebiato, *Pengembangan Masyarakat Dalam Prespekif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012) Hal. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan keterampilan secara teknis untuk memberdayakan masyarakat. Dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat seorang fasilitator harus melihat masyarakat sebagai subjek kegiatan yang harus ditingkatkan yaitu keterampilan dan sikap dan seorang pengembang masyarakat harus bisa berempati dengan keadaan masyarakat supaya terjalin ikatan emosional dan kesabaran dalam suatu proses. Dalam proses tersebut seorang fasilitator harus berhubungan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Secara khusus fungsi tersebut tergambar dalam aspek kegiatan sebagai berikut :

a) Menggali potensi dan kebutuhan

Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Informasi yang dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata tentang jenis kebutuhan dan bentuk dukungan yang diperlukan. Fasilitator akan banyak melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menyusun rencana, menetapkan instrumen dan langkah-langkah pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat secara mandiri mengenal potensi nyata yang dihadapinya. Dalam proses ini, sebaiknya fasilitator melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, pimpinan agama, organisasi kepemudaan, unit usaha dan lembaga terkait lainnya. Menggali potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat dilakukan melalui observasi langsung atau berdialog dengan masyarakat setempat serta pemanfaatan data sekunder seperti demografi desa, statistik, status kesehatan dan rencana tata ruang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Memecahkan masalah

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berpikir ilmiah dan mengantisipasi perubahan. Fasilitator bukan sebagai penentu keputusan atas persoalan yang dipilih, tetapi lebih pada upaya membantu secara sistematis proses belajar masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Masyarakat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari penyelesaian masalah. Fasilitator berperan memberikan kesempatan yang luas agar masyarakat secara mandiri menentukan keputusan. Hindari dominasi fasilitator dalam mengambil solusi, melainkan sebagai penyeimbangan dan pengarah saja, agar solusi yang diambil efektif. Apabila dalam implementasi program terjadi berbagai masalah, sebaiknya fasilitator selalu melibatkan masyarakat melalui musyawarah serta koordinasi dengan pihak terkait. Posisikan diri sebagai pihak yang mempermudah masyarakat menemukan sendiri jawabannya.

c) Memposisikan peran dan tindakan

Bagaimana memposisikan masyarakat agar mampu mengambil peran dan tindakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya? Pertanyaan ini sangat mendasar, ketika suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya akibat kelemahannya. Dalam situasi ini, fasilitator akan lebih dominan memimpin dan berada di garis depan. Masyarakat membutuhkan instruksi, arahan, aturan dan bimbingan secara langsung. Namun demikian, fasilitator tetap memberikan peran yang cukup kepada masyarakat untuk menentukan keputusan penting dan pola tindak yang diperlukan. Pada saat masyarakat mulai menunjukkan peningkatan kapasitas dan mampu mengelolanya, maka fasilitator akan mengambil posisi sebagai mitra atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping untuk mempermudah kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan terhadap akses informasi, melatih peran, pembagian tugas yang jelas dalam setiap kegiatan, menempatkan orang sesuai dengan keahlian. Posisi ini akan berubah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat yang didampinginya.

d) Mengajak masyarakat untuk berfikir

Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan dan indakan terukur terhadap perubahan paradigma dan proses berfikir logis dan terstruktur sebagai bentuk respon terhadap lingkungan. Oleh karena itu, fasilitas dilakukan untuk daya nalar dalam mencapai tujuan. Fasilitas merupakan suatu proses membangun masyarakat kritis dan rasional atau dengan menggunakan tesis Paulo Friere bahwa pemberdayaan adalah strategi pembebasan dari keterbelengguan.

e) Memberi kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dan menjadi indikator penting dalam proses pemberdayaa. Sebuah tatanan ,asyarakat madani dibangun atas pilar transparan, dimana masyarakat dengan mudah mengakses dan memutuskan berbagai kebijakan menyangkut nasib hidupnya. Transparan pelaku pembangunan dan distribusi kewenangan antar pemerintah, legislatif, dan grassroot harus jelas dan terbuka. Keterlibatana masyarakat dengan institusi yang ada dalam perencanaan, melaksanakan sekaligus mengontrol berbagai keputusan yang tekah dibuat mencerminkan komunikais dan nterkasi stakeholders yang dibangun atas dasar kepercayaan.

f) Kemandirian dan pengambilan keputusan

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitas yaitu menumbuhkan kemandirian (otonomi) dalam membimbing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengarahkan upaya pencapaian tujuan. Kemandirian menjadi salah satu paradigma pembangunan yang mengilhami upaya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah proses ini perlu didukung oleh institusi lokal dan masyarakat sipil yang kuat, sehingga tidak berakibat pada penyalahgunaan wewenang pemerintah lokal tetapi lebih meningkatkan keterlibatan institusi masyarakat dalam menentukan kebijakan di daerahnya. Artinya masyarakat diberikan ruang cukup untuk menentukan pilihan atas sejumlah alternatif dan menetapkan visi dirinya kedepan. Keputusan sepenuhnya ditangan masyarakat sendiri sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan evaluator. Kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan harus terus dikembangkan.

g) **Membangun jaringan kerja**

Fasilitasi yang dilkaskan oleh pendamping baik dikalangan pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat atau institusi lain harus menyentuh aspek penguatan jaringan dari tingkat institusi nasional hingga masyarakat. penguatan jaringan sangat penting dalam membangun kebersamaan, keberlanjutan dan kesiapan masyarakat mengantisipasi perubahan. Jaringan yang dibangun harus mengacu pada optimalisasi program, dimana keterlibatan organisasi masyarakat, LSM, pemerintah, dan institusi lain berjalan secara sinergis.¹¹

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan

¹¹ Ibid hal. 27-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan juga dapat disebut suatu proses dimana seseorang akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mampu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.¹²

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu konsep utama dalam ilmu kesejahteraan sosial pada era 1990-an hingga saat ini, sering kali dikaitkan dengan intervensi komunitas. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mendapat penekanan yang lebih khusus, terutama pada model intervensi pengembangan masyarakat. Sebagai suatu konsep, pemberdayaan masyarakat mempunyai berbagai definisi.

Salah satunya bahwa pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna membantu klien kita memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.¹³

Dalam pemberdayaan diharapkan masyarakat yang kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya dan kuat dengan menggali serta mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan masyarakat sejahtera dan mandiri yang mempunyai kekuatan hidup atas potensi dirinya sendiri.¹⁴

¹² Edi Suharto, *Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) Hal. 57

¹³ Isbani Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hal. 205-206

¹⁴ Owin Jamay, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantik, 2004) Hal. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan bahwa pembangunan sosial dapat dengan baik dilakukan oleh rakyat sendiri, dengan membentuk kerjasama secara harmonis pada masyarakat lokal itu sendiri membentuk dasar apa yang disebut dengan pendekatan kemasyarakatan pembangunan sosial. Dengan cara ini, mereka mampu memiliki kontrol pada sumber dan urusan lokal. Baik juga untuk mereka agar menjaga sumber eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial pada tingkat lokal. Pendekatan kemasyarakatan ini sangat dipengaruhi oleh paham “populis”. Pendukung strategi pembangunan sosial yang berbasis masyarakat mengadopsi strategi pembangunan sosial yang berusaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dalam konteks kehidupan masyarakat.

b. Indikator Keberdayaan

Menurut Kieffer sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi perubahan sosial yang lebih besar.
- 2) Keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- 3) Pembebasan yang dihasilkan dari gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.¹⁵

¹⁵ Edi Suharto, *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2014) Hal. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehuler, Hashemi dan Riley sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto, mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *Empowerment Index* atau indeks pemberdayaan. Diantaranya:

- 1) Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti kepasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu berkerja sendiri.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator tersebut, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.
- 4) Terlihat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relative dari dominasi keluarga, responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari dia tanpa ijinnya yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.

- 6) Kesadaran hukum dan politik, mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama Presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hokum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dapat dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpaksa dari pasangannya.¹⁶

3. Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat Kecamatan, Pendamping diperlukan untuk membantu sebagian besar masyarakat miskin tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka membutuhkan pejuang yang menyuarakan mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak. PPKH kabupaten/kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya diseluruh tingkat kecamatan dalam waktu bersamaan sehingga pendamping sangat dibutuhkan sebagai pancaindra PKH. Mengingat KPM untuk melaksanakan komitmen dalam PKH adalah tugas

¹⁶ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping yang tidak kalah penting sehingga KPM tetap bisa mendapatkan bantuannya.

Kewajiban pendamping PKH diantaranya melakukan koordinasi dan konsultasi pendampingan peserta PKH dengan koordinator kecamatan/kota. Membangun kemitraan dengan unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga peserta PKH.

- a. Pendampingan komponen kesehatan pendidikan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampungannya.
 - 2) Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai pada sasaran.
- b. Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lansia dan Penyandang Disabilitas Berat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lansia Direktorat Rehabilitas Sosial Lanjut Dini
 - 2) Pendampingan Penyandang Disabilitas Berat dilaksanakan oleh pendampingan Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3) Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lansian PDB sampai pada sasaran.

Pendamping PKH memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Peran pendamping PKH berdasarkan konsep community worker adalah sebagai berikut:

- 1) Peran dan keterampilan fasilitatif

Peran yang berkaitan dengan motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini adalah menjadi model, melakukan negosiasi dan mediasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dukungan, membangun consenseus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

2) Peran dan keterampilan mendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3) Peran dan keterampilan representasi/perwakilan masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendampingan dengan lembaga-lembaga eksternal atas kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.

4) Peran dan keterampilan teknis

Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat yang bersifat praktis, pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan mampu melakukan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar seperti melakukan riset, penggunaan komputer, presentasi verbal dan tertulis, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.¹⁷

Selain itu tugas pendamping menjadi pemateri dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk pengembangan kepesertaan pendamping bisa memberikan sebuah intervensi perubahan perilaku dan Proses belajar secara struktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin yang disampaikan disetiap bulan dalam P2K2. Pertemuan P2K2 bertujuan

¹⁷ Habibullah, *Peran Pendampingan Pada Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang*. Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial : 2011) Vol. 16 (2). Hal. 101-106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki hidup keluarga di masa depan. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban peserta PKH tidak semata di dorong oleh kekhawatiran akan pengurangan nilai bantuan, namun juga karena adanya kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak dalam keluarga peserta PKH.

4. Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian-bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik dipusat ataupun daerah. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi Dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. PKH lebih dikmaksutkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.¹⁸

Arti program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) , yaitu pendidikan dan kesehatan dan ditetapkan oleh kementerian sosial. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kepada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan PKH sebagai berikut:

¹⁸ Kementerian Sosial. Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan. Tahun 2006 Hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Meningkatkan kondisi sosial KPM
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan KPM
- 3) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM¹⁹.

Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) bagi peserta PKH. Syarat kepesertaan PKH adalah keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen PKH dan telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh kementerian. Komponen yang menjadi tanggung jawab PKH terdiri dari²⁰.

- 1) Ibu hamil/Nifas
- 2) Anak usia dibawah lima tahun (balita)
- 3) Anak usia pra sekolah
- 4) Anak SD dan yang sederajat
- 5) Anak SMP dan yang sederajat
- 6) Anak SMA dan yang sederajat
- 7) Anak penyandang disabilitas berat
- 8) Usia lanjut (tujuh puluh tahun ke atas)

Penerima bantuan PKH adalah keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki satu atau beberapa komponen diatas. Setiap peserta PKH akan mendapatkan kartu identitas PKH sebagai bukti kepesertaan PKH. Peserta mempunyai kewajiban memenuhi persyaratan berkaitan dengan kesehatan. KPM dengan ibu hamil/nifas dan anak usia 0-6 tahun akan menjadi calon peserta PKH harus memenuhi beberapa kewajiban sebelum menjadi peserta PKH dan menerima pembayaran bantuan PKH. Kewajiban tersebut adalah:

¹⁹Ibid

²⁰ Direktorat Jaminan Sosial. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH. Kemensos RI. Tahun 2015 Hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Datang pada pertemuan awal setelah diundang oleh PPKH untuk melakukan klarifikasi, sosialisasi dan mendatangi perjanjian.
- 2) Segera setelah pertemuan awal, calon peserta melakukan kunjungan pertama ke Pusat pelayanan.
- 3) Memenuhi komitmen yang ditandatangani pada saat pertemuan awal.

Gambar 2.1
Logo PKH²¹



Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan,
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

²¹<http://pkh.kemsos.go.id>, diakses 18 April 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelembagaan PKH terdiri atas Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi Teknis, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (Pelaksana PKH) yang dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan²².

a. Kelembagaan di Tingkat Pusat

1) Tim Koordinasi Nasional

- a) Pengarah : Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- b) Ketua : Menteri Sosial
- c) Anggota Tim Koordinasi Nasional terdiri dari pejabat eselon I kementerian/lembaga yang membidangi urusan pengetasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak keluargam disabilitas, lanjut usia, data komunikasi, sebagai berikut:

1. Kementerian sosial
2. Kementerian kesehatan
3. Kementerian pendidikan dan kebudayaan
4. Lementarian agama
5. Kementerian dalam neger

d) Tim koordinasi nasional bertugas:

1. Melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit dan evaluasi
2. Memberikan solusi atas permasalahan lintas sector dan
3. Menyetujui perubahan pelaksanaan program

e) Tim koordinasi nasional PKH ditetapkan dengan keputusan menteri nasional.

2) Tim koordinasi teknis

- a) Pengarah : Menteri Sosial
- b) Ketua : direktur jenderal perlindungan dan jamninan sosial
- c) Sekretaris : jaminan sosial keluarga

²²Joyakin Tampubolan, *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengetahuan Tentang PKH*, 2018, hlm.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tim koordinasi teknis PKH pusat terdiri dari pejabat eselon II wakil kementerian/lembaga terkait
- e) Tim koordinasi teknis pusat bertugas.
 - 1) Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh direktorat teknis PKH
 - 2) Melakukan koordinasi lintas sector terkait agar tujuan PKH dapat berjalan baik
 - 3) Membentuk tim lintas sector yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait
 - 4) Tim lintas sector bertugas menentukan sasaran KPM PKH, dan
 - 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan PKH.
- f) Tim koordinasi teknis pusat ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial
- 3) Pelaksanaan PKH pusat
 - 1) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia
 - 2) Tugas pelaksanaan PKH pusat :
 - a) Melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, validasi, teminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya.
 - b) Memastikan pelaksanaan PKH dengan rencana
 - c) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
 - d) Membangun jaringan dengan kemitraan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program
 - e) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH
 - f) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. kelembagaan PKH di Daerah

Kelembagaan PKH di daerah terdiri dari Tim Koordinasi Teknis Provinsi, tim koordinasi teknis kabupaten/kota. Pelaksanaan PKH kabupaten/kota, dan pelaksanaan PKH kecamatan.

- 1) Tim koordinasi teknis PKH provinsi
 - a) Ketua : Kepala Bappea Provinsi
 - b) Sekertaris : Kepala Dinas/Intansi Sosial Provinsi
 - c) Tim koordinasi teknis PKH Provinsi ditetapkan dengan ketetapan Gubernur
 - d) Tim koordinasi teknis PKH Provinsi bertugas:
 - 1) Menyusun program dan rencana kegiatan PKH
 - 2) Memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH
 - 3) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja pangkat daerah terkait dan intansi/lembaga vertika di Provinsi
- 2) Tim pelaksanaan teknis PKH kabupaten/kota
Susunan tim koordinasi teknis PKH kabupaten/kota terdiri atas
 - a) Ketua: kepala Bappeda Kabupaten/Kota
 - b) Sekretaris: Kepala Dinas/Instansi sosial Kabupaten/Kota
 - c) Tim koordinasi teknis PKH kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota
 - d) Tim koordinasi teknis PKH kabupaten/kota bertugas
 - 1) Menyusun program dan rencana kegiatan PKH kabupaten/kota
 - 2) Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH
 - 3) Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan
 - 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan intansi/lembaga vertikal kabupaten/kota
 - 5) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH
 - 6) Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PKH kepada kepala daerah, kepada pelaksana PKH Provinsi dan pelaksana PKH pusat.

4) Tim Pelaksanaan PKH Daerah

- a) Pelaksanaan PKH daerah dilakukan oleh dinas/intansi sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial
- b) Pelaksanaan PKH daerah terdiri atas pelaksanaan PKH provinsi, pelaksanaan PKH kabupaten/kota, dan pelaksanaan PKH kecamatan
- c) Pelaksanaan PKH provinsi

Pelaksanaan PKH provinsi adalah dinas/intansi sosial terdiri atas:

- 1) Ketua: Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial
- 2) Sekretaris: Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial
- 3) Pelaksanaan PKH Provinsi bertugas:
 - a) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosial PKH di kabupaten/kota
 - b) Melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kabupaten/kota
 - c) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
 - d) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
 - e) Membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
 - f) Melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di kabupaten/kota kepada pelaksana pusat
- d) pelaksanaan PKH kabupaten/kota
Pelaksanaan PKH provinsi adalah dinas/intansi sosial terdiri atas:
 - 1) Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial
 - 2) Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan Pkh Provinsi Bertugas:
 - a) bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosial PKH di kecamatan
 - b) Melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH Kecamatan
 - c) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
 - d) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
 - e) Membangun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
 - f) Melaporkan pelaksanaan PKH kabupaten/kota kepada pelaksanaan PKH pusat dengan tembusan kepada pelaksanaan PKH provinsi
- e) pelaksanaan PKH kecamatan
 - 1) pelaksanaan PKH kecamatan adalah pendamping PKH yang bertugas dikecamatan dan berkoordinasi dengan Camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka diwajibkan ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi koordinator pendamping tingkat kecamatan.
- 2) Pelaksanaan PKH kecamatan bertugas
 - a) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain.
 - b) Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa
 - c) Memastikan kegiatan PKH sesuai dengan rencana
 - d) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
 - e) Membangun jejaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
 - f) Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksanaan PKH kabupaten/kota²³.

²³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Moh Fathur Rohman** dari Fakultas Dakwah Dan Komunika Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul penelitian **Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang dapat di amati tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh atau holistic dan mendalam. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari: tempat penelitian, tahun penelitian, sama-sama membahas tentang peran pendamping program keluarga harapan hanya saja penelitian ini mengenai peran pendamping program keluarga harapan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan penulis membahas mengenai pembinaan terhadap keluarga penerima manfaat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Rahmad Rhido** dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Tahun 2019 dengan Judul Penelitian **Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota**. Jenis penelitian ini yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang dapat di amati tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh atau holistic dan mendalam. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari: tempat penelitian, tahun penelitian, sama-sama membahas tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program keluarga harapan hanya saja penelitian ini mengenai analisi program keluarga harapan sedangkan penulis membahas mengenai pembinaan terhadap keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.

C. Konsep Operasional

Defenisi Operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan konsep. Perumusan konsep operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep dalam dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Operasional konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis.²⁴ Selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional yang memberikan batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan.

Peran pendamping adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok masyarakat dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju. Adapun dengan indikator sebagai berikut:

1. Narasumber : memberikan informasi, materi dan mengelola KPM
2. Pelatih : memberikan kegiatan untuk peningkatan kapasitas KPM
3. Mediator : membantu KPM dalam menyelesaikan masalah, menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah
4. Penggerak : menjadikan KPM sebagai objek dari setiap kegiatan yang dilakukan

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Agar Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat

²⁴ Sodang P, Siagian, tatistik Deskriptif Untuk Penelitian (jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011) hal. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan Dikecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dapat terlihat, maka penulis menetapkan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Jusuf adalah salah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana sistematis atau prinsip-prinsip mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan²⁵.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Yang mana penulis akan menggambarkan fenomena-fenomena serta hal-hal yang terjadi dilapangan. Selain itu, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak ditemukan oleh alat kuantitatif lainnya.²⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan waktu penelitian yang akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal dan mendata sumber riset.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi.
2. Data skunder yaitu data yang di peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

²⁵Jusuf Soewadji , *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wawancara Media, 2012) Hal. 12

²⁶Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) Hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah 1 (satu) orang yakni Pendamping Program Keluarga Harapan. Adapun informan pendukung berjumlah (7) tujuh orang yakni Koordinator Lapangan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.²⁷ Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengamati secara langsung peran pendamping dalam melakukan pembinaan.
- b. Mengamati secara langsung keadaan keluarga penerima manfaat yang ada di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara struktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.²⁸ Adapun tehnik wawancara dengan menggunakan pertanyaan dari pedoman wawancara yang bersifat terbuka yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti, namun jawaban tersebut dapat berkembang seiring dengan jawaban yang diberikan informan. Serta

²⁷ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal. 133

²⁸ Muhamad Idrus, *Ibid Hal.* 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus wawancara ialah mengenai keterlibatan Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

3. Dokumentasi.

Menurut Sugiyono Dokum adalah peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Penggunaan dokumentasi ini diberikan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumentasi ialah memeriksa dokumen secara sistematis. Mengambil data penting di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru sebagai data panduan dan pendukung penelitian.

F. Validasi Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan, dari hasil dan penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yakni memfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian, serta untuk mengantisipasi keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura.
2. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara di berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.²⁹ Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data ulang informasi yang diperoleh di lapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), dan tentunya semakin banyak informan, tentu semakin banyak pula informasi yang diperoleh dalam penelitian.

²⁹ Sugiyono, *metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) Hal. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.³⁰

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif ini dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepi. Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

³⁰Sugiyono *Ibid Hal.200*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Penarikan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.³¹

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

³¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2013) Hal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peran pendamping sudah dijalankan sesuai dengan teori, pendamping sebagai narasumber melakukan sosialisasi serta pemberian motivasi dalam menangani masyarakat miskin untuk mendorong dalam memperdayakan dirinya sendiri, pendamping sebagai pelatih adanya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang diwajibkan bagi seluruh KPM PKH hal ini merupakan sarana pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada pada diri masyarakat namun sekarang P2K2 ditiadakan karena wabah covid-19 sehingga penyampaian materi diberikan melalui sosial media, pendamping sebagai mediator merupakan hal yang selalu dilakukan pendamping terkait adanya masalah yang dihadapi KPM, pendamping sebagai penggerak dengan menjadikan KPM sebagai objek dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Dari temuan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa benar adanya kegiatan yang dilakukan pendamping sesuai dengan acuan teori yang ada pada penelitian ini, namun masih ada peran pendamping yang belum maksimal yaitu pendamping sebagai pelatih yang mana pendamping menjadi pemateri dari setiap modul tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran mengenai Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru sebagai berikut, perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar adanya perbaikan pada kegiatan yang dilakukan untuk tidak semua proses pembinaan KPM dilakukan dengan fasilitator pendamping PKH terutama dalam modul kesehatan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Departemen Sosial Republik Indonesia, Tahun 2009.

Direktoral Jaminan Sosial. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH. Kemensos RI. Tahun 2015

Direktorat Jendral Perlindungan & Jaminan Sosial RI. *Pedoman Operasional Kelembagaan PKH*. Daerah (Jakarta: Kementrian Sosial Ri, 2014)

Edi Suharto, dkk, *pekerja sosial di Indonesia sejarah dan Dinamika Perkembangan* (Yogyakarta: samudra Biru, 2011)

Edi Suharto, *Membangun Rakyat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2013)

Isbani Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas &Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Jusuf Soewadji , *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wawancara Media, 2012)

Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, *Materi Bimbingan Orientasi Pekerja Sosial PKH*, (2018),

Kementrian Sosial. Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan. Kementrian Sosial Tahun 2006

Muhammad Soim, M.A., Drs. Achmad Ghozali Syafe'I, M.Si. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)

Owin Jamay, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantik, 2004)

Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)

Simanjuntak, B., I., L., Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. (Bandung: Tarsito, 1990)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sodang P, Siagian, tatistik Deskriptif Untuk Penelitian (jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011)

Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar* (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Sugiyono, *metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Totok Marianto, M.S. Poerwoko Soebioti, M.Si, *Pengembangan Masyarakat Dalam Prespekif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012)

II. Jurnal :

Atu Nuri Amin. *Efeektifitas Prorgam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Di Kota Surabaya*. (Jawa Timur : 2010)

Habibullah, *Peran Pendampingan Pada Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang*. Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial : 2011) Vol. 16 (2)

III. Revensi Pendukung

<http://pkh.kemsos.go.id>,

UIN SUSKA RIAU

Lampiran I

KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub. Indikator	Item	Teknik pengumpulan data
Peran pendamping dalam pembinaan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan kecamatan lima puluh kota Pekanbaru	Peran pendamping program keluarga harapan	Narasumber	1. Sumber informasi 2. Mengelola KPM	2	Wawancara dan dokumentasi
		Pelatih	1. Konsultasi 2. Penyampaian materi	2	Wawancara dan dokumentasi
		Mediator	1. Penengah dalam memecahkan masalah 2. Mencari alternatif	2	Wawancara dan dokumentasi
		Penggerak	1. Memberikan dorongan atau motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan	1	Wawancara dan dokumentasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Tanggal :

Nama Informan :

Jabatan :

Nama Peneliti :

1. Narasumber
 - a. Apa saja yang dilakukan pendamping sebagai narasumber?
 - b. Apakah pendamping memahami materi yang diberikan?
 - c. Apakah ada narasumber lain yang menjadi pemateri?
 - d. Dimanakah kegiatan ini dilakukan?
2. Pelatih
 - a. Bagaimana pelatihan yang dilakukan pendamping?
 - b. Materi apa saja yang digunakan dalam pelatihan?
 - c. Kapan waktu pelatihan dilakukan?
3. Mediator
 - a. Apakah pendamping membantu menyelesaikan/memberi solusi pada masalah peserta?
 - b. Bagaimana dampingan yang dilakukan pendamping dalam menyelesaikan masalah?
4. Penggerak
 - a. Apakah yang dilakukan pendamping dalam melakukan perubahan untuk KPM?
 - b. Bagaimana pendamping melakukan dampingan agar KPM ingin berpartisipasi?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

Lembaran Observasi

Hari/Tanggal :
 Objek Observasi :
 Tempat Penelitian :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

1. Tujuan

Untuk Memperoleh informasi dan data mengenai Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

2. Aspek yang diamati

Mengamati Secara Langsung Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Lembaran Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Mengumpulkan arsip-arsip dari Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.
2. Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5

**Lembaran Dokumentasi
Gambar. 1**



Wawancara denga Fasilitator Pendamping PKH Kecamatan Lima Puluh

Gambar. 2



Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar. 3



Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM PKH

Gambar. 4



Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar. 5



Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga KPM PKH

UIN SUSKA RIAU



Pekanbaru, 11 Mei 2020

Urut: 4/F.IV/PP.00.9/2779/2020

Blang
1 (satu) Exp
Melaksanakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perdagangan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Dinas
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama
NIM
Semester
Jurusan
Pekerjaan

: Dira Atrika
: 11641202654
: VIII(Delapan)
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
: Mahasiswa Fak. Dakwah dan
: Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"PERAN PENDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU."

Sedapun sumber data penelitian adalah:

"KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wassalam
Kep. Rektor,
Dekan,

Dr. Murdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32679
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
mohonan dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor :
4/F.IV/P.020/2020 Tanggal 11 Mei 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. : DIRA ATRIKA
2. : 11641202654
3. : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
4. : S1
5. : PEKANBARU
6. : PERAN PENDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN LIMA PULUH KOTA
PEKANBARU
7. : KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini terbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Mei 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyampaian kepada Yth:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

© ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1324



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32679 tanggal 13 Mei 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

DIRA ATRIKA
11641202654
DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
S1
DESA BATU AMPAR KEC. KEMUNING-INDRAGIRI HILIR
PERAN PEDAMPING DALAM PEMBINAAN KELUARGA PENERIMAAN
MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN KECAMATAN LIMA
PULUH KOTA PEKANBARU
KANTOR KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Dengan Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Pekanbaru

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dira Atrika, dilahirkan dua puluh dua tahun yang lalu yaitu 09 Agustus 1998 di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, merupakan anak keempat dari empat bersaudara diantaranya anak pertama bernama Remi Wati, kedua Ria Armelia, ketiga Siska Armelia. Penulis terlahir dari pasangan ayahanda Amri Ujang dan ibunda Yuliana. Penulis merupakan formal yang dilaluinya adalah Sekolah Dasar Negeri 004 Batu Ampar, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Kemuning, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA N Tuah Kemuning, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru pada tahun 2016 dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 selama 4 tahun yaitu pada tahun 2020 dan mendapatkan gelar Sarjana. Penulis menyelesaikan studi S1 dengan mengajukan judul skripsi *"Peran Pendamping dalam Pembinaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru"* dibawah bimbingan Ibu Dr. Aslati, M, Ag. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi penulis dinyatakan **LULUS** dengan predikat **SAKTI MEMUASKAN**.

UIN SUSKA RIAU